

Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia

Sucahyo Heriningsih

FE UPN “Veteran” Yogyakarta

email : heriningsih_s@yahoo.co.id

Abstrak

This study aims to empirically examine the effect of the level of accountability and performance of the organization of local governments on the level of corruption in the districts and cities in Indonesia. using LPPD in 2010 and LKPD in 2010, with a sample size of 36 counties and cities. Level of Accountability is measured with a variable rate (audit opinion, SPI weakness, and Adherence to legislation) and the implementation of the Local Government Performance (Key Performance Indicators / IKK). Results of regression test show that the measured level of accountability (audit opinion, SPI Weakness level, the degree of compliance with environmental legislation) and the delivery of local government performance (IKK scores of LPPD) did not affect the level of corruption in the government district and city in Indonesia.

Kata Kunci: Tingkat akuntabilitas, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Tingkat Korupsi

PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi di Indonesia yang berawal disekitar tahun 2000 an telah membawa angin segar bagi pemerintah daerah di berbagai daerah untuk bisa mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri. Dengan dikeluarkannya UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah , dan kemudian di revisi dengan adanya UU No.32 tahun 2004 lebih menegaskan kewenangan Pemda dalam pelaksanaan otonomi yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri sistem pemerintahan daerah yang sudah ada. Adanya otonomi daerah tentunya memberikan banyak peluang para pimpinan untuk lebih mandiri dalam mengatur semua sektor secara otonom. Namun

demikian tidak bisa di pungkiri bahwa dengan adanya otonomi daerah telah banyak terjadi kasus-kasus korupsi terungkap dan terjadi di daerah.

Berikut ini beberapa kepala daerah yang pernah dan akan berhadapan dengan pengadilan: Syamsul Arifin, Gubernur Sumatera Utara, terpidana kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Langkat tahun 2000-2007, Agusrin Najamudin, Gubernur Bengkulu, terpidana kasus korupsi pajak bumi dan bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu tahun 2006-2007. Thaib Armaiyn, Gubernur Maluku Utara, tersangka kasus korupsi Dana Tak Terduga tahun 2004 dan APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2007. Mochtar Muhammad, Wali Kota Bekasi, terpidana kasus suap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010. Sunaryo, Wakil Wali Kota Cirebon, terpidana kasus penyelewengan dana belanja barang dan jasa senilai Rp 4,9 miliar dalam APBD Kota Cirebon 2004. Eep Hidayat, Bupati Subang, terpidana kasus korupsi biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan senilai Rp 14 miliar tahun 2005-2008. Satono, Bupati Lampung Timur, terpidana kasus korupsi penggelapan dana rakyat dalam APBD sebesar Rp119 miliar dan menerima suap Rp 10,5 miliar dari pemilik Bank Perkreditan Rakyat, Tripanca Setiadana, pada 2005. Fauzi Siin, Bupati Kerinci, terpidana kasus suap dana APBN 2008. John Manuel Manoppo, Wali Kota Salatiga, tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga. (Tempo online, Sabtu, 09 Februari 2013 | 05:51 WIB).

Kasus korupsi di atas adalah hanya sebagai contoh dari beberapa kasus korupsi yang terjadi di daerah, yang kemungkinan terjadi karena adanya pergeseran kekuasaan pusat di daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya diberikan kepada daerah agar pemerintah daerah meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk tercapainya *good governance* (Mardiasmo, 2009). Di dalam UU no 32 tahun 2004 selain memberikan kewenangan otonomi kepada Pemda juga mewajibkan agar setiap kepala daerah membuat laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. LPPD merupakan laporan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD Pemda kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggungjawab dan karakteristik dari masing-masing Pemerintah daerah masing-masing.

Dalam LPPD lebih menekankan pada evaluasi kinerja dan tatacara penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 tahun 2009, tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah. Nilai indeks komposit kinerja (IKK) penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan total penjumlahan hasil yang meliputi indeks capaian kinerja dengan tingkat indeks capaian kesesuaian materi. Hasil EKPPD tahunan digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, penghapusan/ penggabungan daerah otonom. EKPPD merupakan suatu sistem yang pengukuran dengan menggunakan IKK dalam penilaian yang terintegrasi dengan mandiri oleh pemerintah daerah dengan yang dilakukan oleh Tim Daerah dan Tim Nasional EPPD (Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Sehingga IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, LPPD tidak akan terlepas dari pengawasan para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga tercipta kondisi yang kondusif dan akan mudah teridentifikasi adanya kecurangan. Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam penelitian ini menggunakan pengukuran yang berasal dari hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahun secara rutin di audit. Dari hasil audit atas LKPD akan diperoleh opini dari auditor atas kinerja dari pemerintah daerah juga.

Dengan demikian baik laporan dalam LPPD maupun LKPD kedua-duanya adalah menunjukkan sebuah laporan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala daerah. Harapannya akan teridentifikasi lebih cepat kemungkinan-kemungkinan terjadinya ketidakwajaran dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Penelitian merupakan kajian empiris yang menguji secara empiris dua hasil laporan kinerja pemerintah daerah dan bila di hubungan dengan tingkat korupsi. Logika penalaran yang dikembangkan penulis adalah bila kedua laporan baik hasil dari LPPD nya menunjukkan angka yg tinggi demikian juga opini auditor yang bagus maka seharusnya tingkat korupsi nya menjadi lebih rendah/ sedikit.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penulis tahun 2013 yang menguji pengaruh opini audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah menunjukkan secara statistic membuktikan bahwa variabel opini dan kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pulau Jawa. (Heriningsih, 2013). Serta dari penelitian Susilo dan Shiddig (2013) yang menguji pengaruh karakteristik pemerintah (ukuran daerah, tingkat ketergantungan kepada pusat, kekayaan daerah, belanja modal) dengan temuan audit (temuan audit dibandingkan dengan total anggaran) terhadap Kinerja Pemda (LPPD), hasil menunjukkan bahwa Sedangkan, variabel temuan audit BPK dengan proksi temuan audit dibanding total anggaran belanja, variabel tingkat

kekayaan daerah dengan proksi PAD dibanding total pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia, dan variabel yang lain tidak berpengaruh secara statistik.

Berdasarkan dari latar belakang dan beberapa hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini akan menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh kinerja yang diukur dengan IKK hasil dari LPPD dan (opini audit, kelemahan pada SPI serata ketaatan pada perundang-undangan) yang merupakan hasil dari LKPD, terhadap Tingkat korupsi .

TINJAUAN PUSTAKA

Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Pemerintah Daerah merupakan tingkat pengukuran kinerja yang diukur dengan menggunakan hasil audit BPK RI atas LKPD setiap tahunnya. Terdapat tiga indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan tiga hasil yang terdapat dalam LKPD yang telah diaudit. Opini auditor menjadi pusat perhatian dalam setiap laporan kinerja suatu entitas demikian juga dengan penelitian ini sehingga dengan menggunakan penalaran bahwa jika Pemerintah daerah memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) maka harapannya akan semakin bagus kinerja pemerintah daerah dan pastinya korupsi tidak dapat terjadi. Sedangkan jika terdapat tingkat kelemahan pada Sistem pengendalian internal maka tentu terdapat tambahan masukan untuk memperbaiki pengendalian agar lebih efektif di tahun berikutnya. Yang ke tiga ketaatan pada perundang-undangan dapat dikatakan bahwa semakin banyak ditemukan ketidaktaatan maka akan mudah disinyalir bisa terindikasi terjadinya korupsi. (heriningsih, 2013).

Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EDDP) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintah daerah yang baru dibentuk. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan

menggunakan sistem pengukuran kinerja. EKPPD dilakukan oleh Tim Nasional dan Daerah yang membantu presiden dalam dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional (Permendagri No 73 tahun 2009). Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa EKPPD merupakan evaluasi ditingkat internal pemerintah, dimana jika indeks IKK nya tinggi maka menunjukkan kinerja penyelenggara pemerintah Daerah (LPPD) berjalan efektif dan efisien, yang bila dikaitkan dengan tingkat korupsi maka jika hasil indeks IKK nya bagus maka Tingkat korupsi akan rendah.

Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

Tingkat korupsi yang terjadi di suatu daerah tentunya sangat sulit untuk diidentifikasi. Tentusaja kebanyakan korupsi yang terjadi saat ini karena sifat dari korupsi itu sendiri yang merupakan suatu tindakan yang tersembunyi yang memang disengaja oleh palkunya. Dalam penelitian ini tingkat korupsi yang dipakai dengan memodifikasi angka indeks persepsi korupsi yang diterbitkan oleh Lembaga Transparansi Internasional Indonesia. Skor IPK antara angka 1 dan 10, dimana 1 (angka minimal atau korupsi didaerah banyak sekali), dan 10 menunjukkan (angka maksimal atau korupsi didaerah sedikit yang terjadi). Berdasarkan angka indeks tersebut maka jika $IPK = 1$ maka diasumsikan (Tingkat korupsi 9), demikian juga untuk $IPK = 10$ maka (tingkat korupsi 1). (heriningsih, 2013).

Dari penjelasan hubungan dari ketiga variabel di atas maka dapat di hipotesiskan:

- H1: Terdapat pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah
- H2: Terdapat pengaruh Tingkat Kelemahan SPI terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah
- H3: Terdapat pengaruh tingkatketaatan terhadap perundang-undangan terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah
- H4: terdapat pengaruh Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari BPS Indonesia dan perpustakaan data BPK, sedangkan tingkat korupsi di pemerintah daerah diambil dari situs [Http: www. Ipkindonesia.org](http://www.Ipkindonesia.org). Berikut ini tabel pemilihan sampel.

Tabel 1

Pemilihan sampel

Populasi: Kota dan kabupaten yang memiliki indek Kinerja Kunci th 2010	432 kabupaten dan kota
Kota dan kabupaten yang memiliki indek persepsi korupsi th 2010	36 kabupaten dan kota
Jumlah sampel yang di observasi	36 kabupaten dan kota

Variabel Penelitian

Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah merupakan variabel independen yang diukur dengan tiga indikator (opini audit, kelemahan Sistem pengendalian internal dan ketaatan pada perundang-undangan)

a. Opini Audit

Opini Audit merupakan variabel Independen yang diukur menggunakan variabel dummy. Laporan audit Independen merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, opini auditor yang merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria Standar akuntansi Pemerintah. Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terdiri dari empat opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*). Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, Kategori *unqualified* yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*) diberi nilai *dummy* 1 dan kategori *non unqualified* yang terdiri dari Wajar dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*) diberi nilai *dummy* 0 (heriningsih, 2013)

b. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Kelemahan SPI di ukur dengan menggunakan jumlah temuan pelanggaran atas SPI yang diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK. (heriningsih, 2014)

c. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di ukur dengan menggunakan jumlah temuan pelanggaran atas ketaatan terhadap undang-undang yang diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK.(heriningsih, 2014)

Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota merupakan variabel independen, dengan menggunakan skor skor IKK yang merupakan hasil dari laporan evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD 2010. Peneliti ini menggunakan hasil EKPPD tahun 2010, karena dengan menggunakan data tahun terkini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi saat ini tentang skor IKK yang berkisar nilai 0 (kinerja minimal) -4 (kinerja maksimal). Evaluasi kinerja pemerintah daerah dilakukan berdasarkan penilaian *portfolio* secara *desk evaluation* terhadap data yang dimuat dalam LPPD tahun 2010 dan penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang dicapai oleh masing-masing pemerintah daerah. Evaluasi pemeringkatan kinerja Pemda ini baru pertama kali dilakukan untuk LPPD tahun anggaran 2007 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Agustus 2009 oleh Kementerian Dalam Negeri. (Susila dan Shiddiq, 2013).

Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi pemerintah daerah. Tingkat korupsi yang dipakai dalam penelitian ini adalah memodifikasi angka indeks persepsi korupsi yang di terbitkan oleh Lembaga Transparansi Internasional Indonesia.

1= angka indek minimal berarti tingkat korupsi daerah banyak terjadi

10 = angka indek maksimal yang berarti tingkat korupsi di daerah sedikit yang terjadi

Berdasarkan angka indeks tersebut maka dapat di asumsikan bahwa jika IPK=1 dapat diasumsikan tingkat korupsi (TK=10), atau sebaliknya jika IPK=10 maka dapat diasumsikan tingkat korupsi (TK=1)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Hasil analisis data penelitian akan diuraikan dengan statistic diskriptif . Hasil analisis deskriptif variabel penelitian disajikan tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
opini	36	.00	1.00	.3056	.46718
spi	36	.00	16.00	7.4167	3.28959
uu	36	4.00	23.00	9.4722	4.03900
LPPD	36	1.05	3.24	2.4499	.46073
tkorupsi	36	3.29	6.39	5.1108	.61211
Valid N (listwise)	36				

Variabel opini audit nilai rata-rata menunjukkan 0,3056 dan untuk variabel kelemahan terhadap SPI nilai rata-rata mencapai 7,4167 yang berarti masih banyak yang memiliki kelemahan terhadap SPI dengan minimal 0 maka kasus kelemahan SPI di 36 kota dan kabupaten yang sebagai sampel dalam penelitian ini termasuk masih sedikit 0, karena bila dilihat nilai maksimal kelemahan SPI bisa mencapai 16. Sedangkan ketaatan pada perundang-undangan menunjukkan nilai rata-rata 9,4722 yang berarti masih banyak ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Variabel kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah menunjukkan angka rata-rata 2.4499 hal ini menunjukkan dari jumlah sampel 36 kabupaten dan kota sebagian besar nilai skor IKK nya bagus karena nilai rata-rata sudah hampir mencapai skor tertinggi yaitu 4.

Variabel Tingkat korupsi menunjukkan angka rata-rata 5,1108 yang dapat dikatakan bahwa tingkat korupsi berdasarkan survey yang dilakukan oleh lembaga Transparansi Indonesia maka sebagian besar kota dan kabupaten memiliki tingkat korupsi yang hampir 5 persen dari point indeks tertinggi yaitu 10.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi berganda yang terdapat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Regression

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.204 ^a	.042	-.082	.63669

a. Predictors: (Constant), LPPD, opini, spi, uu

b. Dependent Variable: tkorupsi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.048	.692		7.292	.000
	opini	.080	.233	.061	.341	.735
	spi	-.024	.033	-.130	-.731	.471
	uu	.021	.027	.139	.774	.445
	LPPD	.008	.235	.006	.032	.975

a. Dependent Variable: tkorupsi

Berdasarkan tabel 3 maka persamaan regresi berganda yang dihasilkan sebagai berikut:

$$Y = 5,048 + 0,080 x_1 - 0,024 x_2 + 0,021 x_3 + 0,008 x_4$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa jika opini audit, ketaatan pada perundang-undangan dan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan rendah maka tingkat korupsi akan cenderung rendah juga. Sedangkan untuk kelemahan terhadap SPI maka

jika kelemahan SPI nya rendah maka dapat di mungkinkan akan terjadi banyak terjadi korupsi. Dengan demikian hasil dari model regresi ini untuk variabel X2 dan X3, mendukung teori yang diajukan peneliti.

Pengujian Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi (Hipotesis 1)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk variabel opini auditor adalah 0,735, karena di atas 0,05 maka H1 di tolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan secara statistic variabel opini dengan tingkat korupsi di kabupaten dan kota di Indonesia tidak berpengaruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika opini WTP (opini terbagus pun belum tentu menjamin adanya bebas korupsi).

Pengujian Tingkat Kelemahan SPI Terhadap Tingkat Korupsi (Hipotesis 2)

Hasil pengujian untuk variabel kelemahan SPI menunjukkan angka propabilitas 0,471, yang berarti di atas 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Kelemahan terhadap SPI juga secara statistic membuktikan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hal ini dapat dikatakan bahwa walaupun SPI di suatu pemerintahannya bagus, namun masih sangat memungkinkan adanya bahaya korupsi yang bisa terjadi.

Pengujian Ketaatan Terhadap Perundang-Undangan (Hipotesis 3)

Demikian juga untuk variabel ketaatan terhadap perundang-undangan juga menunjukkan angka yang sama yaitu diatas 0,05 atau di angka probabilitas nya mencapai 0,445. Hal ini sangat mungkin terjadi bahwa walaupun tidak adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan namun bisa saja masih terjadi indikasi korupsi terjadi.

Pengujian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Perundang-undangan (Hipotesis 4)

Berdasarkan laporan LPPD yang merupakan laporan penilaian kinerja oleh pihak internal pemerintah maka secara statistic menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas mencapai angka 0,975 yang di atas 0,05.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda maka dapat di jelaskan bahwa model penelitian telah mendukung teori bahwa baik variabel opini audit, ketaatan terhadap perundang undangan dan kinerja penyelenggara pemerintah daerah memiliki arah positif di model regresinya , yang berarti semakin tinggi variabel independen maka tingkat korupsi juga akan naik, sedangkan untuk ketaatan terhadap SPI memiliki arah negative. Sehingga dapat dikatakan bahwa model ada yang mendukung teori dan ada juga yang perlu dikaji ulang dalam penelitian berikutnya, karena masih belum mendukung teori.

Secara empiris dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja pemerintah daerah bisa diukur dengan LPPD maupun LKPD. Dimana keduanya merupakan dua laporan yang tujuannya sama yaitu untuk pengukuran kinerja walaupun isinya agak berbeda. LPPD merupakan Laporan untuk internal pemerintah sedangkan LKPD laporan kinerja yang telah diaudit oleh pihak eksternal yaitu BPK, ternyata dengan menggunakan data dari LKPD maupun LPPD tidak dapat mendukung hipotesis, yang mengkaitkan dengan tingkat korupsi di pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas yang diukur (opini audit, tingkat Kelemahan SPI, tingkat ketaatan terhadap perundang-undangan) dan Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (skor IKK dari LPPD) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini menggunakan sampel yang hanya memiliki indeks persepsi korupsi dan yang memiliki skor IKK dimana tidak semua kota dan kabupaten memiliki di Indonesia , hal ini yang mungkin menjadi perlu untuk diteliti ulang dengan menggunakan alat pengukuran yang berbeda misal untuk tingkat korupsi dengan melihat data pelanggaran hukum yg terjadi di pemerintah daerah. Penelitian sepengetahuan peneliti belum banyak sehingga belum banyak yang bisa diperbandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dollery. B. E, and Grant. B, 2011, *Economic Efficiency versus Local Democracy? A Evaluation of Structural Change and Local Democracy in Australian Local Government*, Journal of Interdisciplinary Economics.
- Department of Local Government and Planning, 2011, *Financial management (sustainability) Guideline*, Australia
- Geys. Benny, Friedrich. Heinemann, Alexander Kalb, 2007, *Value for money? Measuring German Lokal Government Efficiency. Proceedings Conference Governance research unit*, Berlin, Germany.
- Guthrie. J, 1998, *Application of Accrual Accounting in the Australian Public Sector – hetoric or Reality? Financial Accountability and Management*, Februari, Vol. 14 No. 1.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Heriningsih, Sucahyo, dan Marita, 2013, *Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah kabupaten dan Kota di Pulau Jawa)*, Buletin Ekonomi, Vol 11, No.1. FE UPN VY, Yogyakarta.
- Heriningsih, Sucahyo, dan Ruserlistyani, 2014, *Pengungkapan Laporan Keuangan, Kelemahan SPI, dan Ketaatan pada Perundang-undangan yang Dianalisis dari opini Auditor*, Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper Sinau 3, UPN “Veteran” Yogyakarta, Jakarta, Jawa Timur.
- Hughes, O. E., 1998, *Public Management and Administration*. 2nd Ed., London: MacMillan Press Ltd.
- Jackson, Peter M. (Editor). 1995. *Measures for Success in the Public Sector: A Public Finance Foundation Reader. Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)*.
- Jones, Rowan & Pendlebury, Mourice, 2000, *Public Sector Accounting*, 5th Ed. London: Financial Times- Prentice Hall.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andy Offset: Yogyakarta.
- Nurcholish, H. (2005). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Setiawan, Wahyu. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas laporan Keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi Pemerintah daerah di Indonesia*, Skripsi., Undip.

